



## Implementasi Konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam Pengembangan Ekonomi Biru di Kawasan Indo Pasifik: Studi Kasus *Chairmanship* Indonesia di ASEAN Tahun 2023

Miftah Febrianti<sup>1</sup>, Aep Saefullah<sup>2</sup>, Nurhayati Nurhayati<sup>3</sup>, Tohhiroh Tohhiroh<sup>4</sup>  
<sup>1-4</sup> STIE Ganesha

Email: [miftahfebrianti1300@gmail.com](mailto:miftahfebrianti1300@gmail.com)<sup>1</sup>, [aep@stieganessa.ac.id](mailto:aep@stieganessa.ac.id)<sup>2</sup>, [doanghayati289@gmail.com](mailto:doanghayati289@gmail.com)<sup>3</sup>, [tohhiroh8@gmail.com](mailto:tohhiroh8@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *The Indo Pacific region is an area rich in natural resources and has great economic potential. However, rapid economic growth and lack of awareness of environmental protection and social sustainability have led to negative impacts on the environment and society in the region. To overcome this problem, the ESG (Environmental, Social, and Governance) concept has been widely recognized as a framework for encouraging sustainable economic growth by considering environmental, social and good governance factors. The purpose of this research is to examine how the ESG concept is applied in the development and development of the blue economy in the Indo Pacific Region, especially during Indonesia's tenure as chairman of ASEAN in 2023. In this research, we will identify the concrete steps taken by Indonesia in implementing the concept. ESG and promoting the blue economy in the region. This research uses a descriptive qualitative approach method. Data was processed and collected using questionnaires and library literature. The research object consisted of 50 STIE Ganesha student respondents. By analyzing the policies and initiatives launched by the Indonesian government during their leadership in ASEAN. Relevant data will be collected through literature reviews and official documents. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of Indonesia's efforts to implement ESG concepts and promote the blue economy in the Indo Pacific Region. This research limits the scope by using students' perspectives regarding the ESG concept in developing the blue economy in the Indo Pacific region. This research can also provide insight into the challenges faced and the opportunities that exist in developing a sustainable economy in this region. Relevant policy implications will also be identified to support the future development of the blue economy.*

**Keywords:** *ESG, blue economy, Indo Pacific Region, Indonesian Chairmanship, ASEAN.*

**Abstrak.** Kawasan Indo Pasifik merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kurangnya kesadaran akan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sosial telah menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di kawasan ini. Untuk mengatasi masalah ini, konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*) telah diakui secara luas sebagai kerangka kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan konsep ESG dalam pembangunan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Indo Pasifik, khususnya selama Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023. Pada penelitian kali ini akan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang diambil oleh Indonesia dalam menerapkan konsep ESG dan mempromosikan ekonomi biru di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Data diolah dan dikumpulkan menggunakan angket kuesioner dan literatur pustaka. Objek penelitian terdiri dari 50 responden mahasiswa/i STIE Ganesha. Dengan melakukan analisis kebijakan dan inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia selama masa kepemimpinan mereka di ASEAN. Data-data yang relevan akan dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dokumen resmi. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait upaya Indonesia dalam menerapkan konsep ESG dan mempromosikan ekonomi biru di Kawasan Indo Pasifik. Penelitian ini membatasi ruang lingkup dengan menggunakan persepsi sudut pandang mahasiswa/i mengenai konsep ESG dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan indo pasifik. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan terkait tantangan yang dihadapi dan peluang yang ada dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ini. Implikasi kebijakan yang relevan juga akan diidentifikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi biru di masa depan.

**Kata kunci:** *ESG, ekonomi biru, Kawasan Indo Pasifik, Chairmanship Indonesia, ASEAN.*

## PENDAHULUAN

Received: April 17, 2024; Accepted: May 17, 2024; Published: June 30, 2024

\* Miftah Febrianti, [miftahfebrianti1300@gmail.com](mailto:miftahfebrianti1300@gmail.com)

Indo-Pasifik adalah kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kawasan ini mencakup 60 persen dari perekonomian dunia, dua pertiga dari total pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi lebih dari setengah penduduk dunia, dan tujuh dari 15 negara ekonomi maju. Kawasan ini sangat majemuk, Lebih dari 3.000 bahasa dan banyak agama membentang di antara dua samudera dan tiga benua (Jakarta, 2021). Indo-Pasifik muncul sebagai konsep geografis yang mencakup kawasan Lautan Hindia dan Lautan Pasifik sejak Guurpet S. Kurana menggunakan kata “*Indo-Pacific Strategy*” pada tahun 2007 sebagai seorang Marine Strategist dan Direktur Eksekutif The New Delhi National Marine Foundation (Herindrasti, 2019). Indo-Pasifik telah menjadi area sentral dalam pembahasan isu geopolitik maritim, keamanan, perdagangan, dan kegiatan lingkungan. Wilayah Indo-Pasifik juga berdiri di persimpangan perdagangan internasional, dengan sekitar 32,2 juta barel minyak mentah melewati setiap tahun dan 40% dari ekspor global berasal dari wilayah tersebut (Pangestu et al., 2021). Oleh karena itu, Salah satu sasaran kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Indo Pasifik adalah dibidang ekonomi. Ada beberapa kerjasama ekonomi yang sedang diusahakan Indonesia diantaranya dibidang infrastruktur dan ekspor industri Indonesia (*Wawancara Eksklusif Dengan Pengurus Pusat Kajian Indo Pasifik: Kita Dorong UNP Menuju Universitas Kelas Dunia*, 2019).

Jika dilihat dari Kondisi geografis Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di dalam kawasan segitiga karang menganugerahkan Indonesia dengan potensi laut yang sangat besar dan valuasi tinggi (*Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation | Kementerian PPN/Bappenas*, 2021). Wilayah laut Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi ekonomi kelautan mencapai Rp. 3000 triliun sementara yang baru digarap baru Rp. 291,8 triliun. Artinya, potensi nilai ekonomi kelautan belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Pembangunan kelautan harus tepat sasaran berdasarkan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan agar pemanfaatan laut dapat mencapai tujuannya yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian, diperlukan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dari sektor ekonomi, sosial-budaya, serta politik, pertahanan dan keamanan untuk mendukung program pembangunan kelautan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah merumuskan dalam kebijakan kelautan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Langkah penting selanjutnya adalah membuat

program-program pembangunan kelautan Indonesia yang komprehensif dan terintegrasi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Kelautan Dunia (Sari, 2019).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan dalam artikel (*Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation | Kementerian PPN/Bappenas, 2021*) bahwa dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19, Indonesia perlu memiliki pendekatan baru dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Blue Economy adalah salah satu jawabannya, dengan potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 65 persen total luas negara Indonesia berupa laut. Gagasan ini sejalan dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi mereka dari sektor kelautan menggunakan prinsip ekonomi biru, pemanfaatan potensi kelautan dengan mempertimbangkan perhitungan jangka panjang antara keberlanjutan sosial dan lingkungan (Putri & Raharyo, 2019).

Krisis iklim yang kian memburuk memicu dunia untuk merubah sistem pembangunan yang semula tidak berpihak pada keberlanjutan masa depan bumi menuju sistem pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia perlahan turut merubah arah pembangunan ke ranah berkelanjutan setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dengan Menteri Lingkungan dan Iklim Swedia Per Bolund dan Menteri Infrastruktur Swedia Thomas Eneroth menandatangani komitmen untuk mengembangkan konsep ekonomi biru di Indonesia. Konsep ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025. Salah satu pembangunan yang digencarkan adalah sektor bisnis yang memenuhi standar ESG untuk investasi yang berkelanjutan (ESG, 2022). Menurut (Lim et al., 2022) Tata kelola sosial lingkungan (ESG) dan manajemen kualitas total (TQM) adalah dua mekanisme relevan yang sangat menjanjikan bagi dunia yang progresif dan berkelanjutan. Vinda mengatakan pada awalnya, konsep *blue economy* hanya mencakup seluruh produk perikanan yang bernilai ekonomi. Namun sekarang konsep tersebut meluas dan mencakup keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu kontributor PDB terbesar di Indonesia. Keberlanjutan dalam blue economy tersebut mengintegrasikan triple bottom line dari pengembangan berkelanjutan, yaitu antara *environment, social, dan governance (ESG)* (redaksi, 2023). Implementasi *Environmental, Social, and Governance (ESG)* merupakan wujud nyata tindak lanjut agenda infrastruktur G20 Presidensi Indonesia terkait infrastruktur berkelanjutan dan quality infrastructure invesment. Inisiatif ini menjadi kebijakan implementasi ESG yang pertama kali ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam pembiayaan infrastruktur (*Implementasi ESG Wujud Nyata Tindak Lanjut Agenda Infrastruktur G20 Presidensi Indonesia, 2022*).

## KAJIAN PUSTAKA

### **Konsep ESG (Environmental, Social, and Governance)**

Menurut (Qodary & Tambun, 2021) ESG adalah sebuah standar perusahaan dalam praktik investasi dimana mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaannya sehingga searah konsep environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola). Hal-hal yang dibahas dalam kriteria environmental (lingkungan) yaitu terkait konsumsi energi sebuah perusahaan, limbah, polusi, konservasi sumber daya alam, dan perlakuan terhadap flora dan fauna. Kriteria social (sosial) membahas hubungan perusahaan dengan pihak eksternal seperti masyarakat, pemasok, kelompok masyarakat, pembeli, dan badan hukum lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Sedangkan kriteria governance (tata kelola) membahas mengenai alur pengelolaan yang baik dan berkelanjutan pada internal perusahaan. Pengungkapan ESG merupakan metode pengukuran baru dalam pengungkapan informasi sukarela perusahaan, dimana biasanya adalah pelaporan CSR dalam laporan tahunan yang berdiri sendiri, pelaporan keberlanjutan dan kemudian dilanjutkan dengan pelaporan terintegrasi.

### **Ekonomi Biru**

Dalam artikel (“Ekonomi Biru,” n.d.) Bank Dunia menyatakan ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Ada berbagai sektor yang termasuk dalam kategori ekonomi biru, di antaranya perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola dengan konsep berkelanjutan, maka tiap sektor mampu membantu mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Menurut Sarundajang dalam (Mahmud, 2018) konsep ekonomi biru (*blue economy*) adalah model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*). Konsep ini mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi yang tidak merusak lingkungan. Menurutnya, persyaratan kunci mencapai kejayaan dalam pelaksanaan pembangunan berbasis kelautan (*sea based oriented*) setidaknya harus berpedoman pada lima prinsip yang harus diimplementasikan secara terpadu, yaitu *Ocean Blue Economy*, *Ocean Governance Policy*, *Ocean Environmental Policy*, *Ocean Maritime Cultural Policy*, dan *Ocean Maritime Security Policy*.

Definsi terkait menurut UNRIC (United Nations Regional Information Centre), Blue economy merupakan sebuah penerapan dari green theory sebab dalam penerapan blue economy ditekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berasal dari laut dengan menjaga ekosistem dan tanpa merusak ekosistem kelautan (Pradana, 2021). (Latupapua et al., 2022) Mengatakan Ekonomi Biru fokus pada Sustainable Development yang merupakan koreksi sekaligusperkayaan dari Ekonomi Hijau dengan semboyan “Blue Sky –Blue Ocean” dimana Ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Blue Economy mengoptimalkan sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Pada awalnya, konsep blue economy hanya mencakup seluruh produk perikanan yang bernilai ekonomi. Namun sekarang konsep tersebut meluas dan mencakup keberlanjutan ekosistem laut sebagai salah satu kontributor PDB terbesar di Indonesia (redaksi, 2023). Salah satu alternatif pendekatan yang mampu memformat pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya alam, yaitu konsep ekonomi biru. Substansi ekonomi biru terletak pada manajemen yang berkesinambungan dan melestarikan berbagai jenis sumber daya alam khususnya sumber daya kelautan (Erviyanto, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada di ruang lingkup. Pada penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa komitmen perusahaan terlibat dalam aktivitas lingkungan masih belum direspon dengan baik oleh pemangku kepentingan (investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat), sehingga tidak mampu memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan (Minggu et al., 2023).

Pada penelitian (Harymawan et al., 2021) Di Indonesia ditemukan bahwa perusahaan yang tertekan secara finansial memiliki kualitas pengungkapan ESG yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak tertekan. Kemudian pada hasil penelitian (Koroleva et al., 2020) menunjukkan bahwa, sesuai dengan harapan, perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip ESG menunjukkan kinerja keuangan yang jauh lebih baik daripada perusahaan lain. Selain itu, faktor tata kelola sangat terkait dengan kinerja perusahaan, memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan perusahaan dalam hal kegunaan mengadopsi informasi ESG.

Kemudian (Pradana, 2021) pada penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dilihat dari perannya untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota dengan pencapaian kesepakatan ekonomi biru komitmen untuk membentuk kemitraan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, inklusif dan saling menguntungkan. Selain memiliki potensi komoditas perikanan, Indonesia

memanfaatkan peluang tersebut untuk memberikan kontribusi dalam tahap implementasi model ekonomi biru di sektor industri perikanan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan selama 2 bulan (April-Mei) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menggambarkan persepsi Mahasiswa/i STIE Ganesha Terkait Implementasi Konsep ESG dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan indo pasifik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Dengan objek penelitian sebanyak 50 mahasiswa, yang terdiri dari seluruh jenjang semester.

Data akan dikumpulkan melalui penyebaran angket kuisisioner, google-form, dan studi literatur. Hasil dari tiga jenis data tersebut, digunakan untuk mendapatkan data data informasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, Kemudian dilakukan analisis tematik untuk mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi. Analisis ini merujuk pada literatur pustaka terkait untuk mendukung interpretasi dan pemahaman yang lebih dalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Biru (*blue economy*) dikembangkan oleh Gunter Pauli (1994) sebagai koreksi sekaligusperkayaan dari Ekonomi Hijau (*green economy*) (Mahmud, 2018). Juga pada masa pemerintahan presiden Jokowi ekonomi biru mulai di beri perhatian kembali, salah satu cara merealisasikan program Ekonomi Biru yang sedang di kembangkan adalah dengan menggunakan konsep ESG. Yaitu, Implementasi ESG akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025 dengan piloting pada infrastruktur sektor perumahan dan sumber daya air yang dimulai pada tahun 2022. Implementasi awal ini akan dilakukan reviu sehingga dapat menjadi ruang perbaikan maupun peluang implementasi dalam produk dukungan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas (*Implementasi ESG Wujud Nyata Tindak Lanjut Agenda Infrastruktur G20 Presidensi Indonesia, 2022*).

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil penyebaran angket kuisisioner dan google-form. Berdasarkan hasil tersebut dapat di temukan data-data sebagai berikut,

- Mayoritas dari responden belum pernah mendengar tentang konsep ESG

- 7 dari 11 responden berpendapat bahwa meningkatkan tata kelola yang baik dalam bisnis dan pemerintahan merupakan alasan pentingnya implementasi konsep ESG dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan Indo Pasifik
- 7 dari 11 responden mengatakan hambatan utama dalam implementasi konsep ESG dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan Indo Pasifik adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang ESG. Sejalan dengan pernyataan (Russell, 2022) yang mengatakan bahwa hambatan paling signifikan dalam menangani isu-isu material ESG adalah pengetahuan akan keberlanjutan yang terbatas.
- 40 dari 50 responden menjawab sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam implementasi konsep ESG di kawasan Indo Pasifik adalah Pemberdayaan masyarakat serta Sektor keuangan dan investasi .
- Seluruh responden percaya bahwa Chairmanship Indonesia di ASEAN tahun 2023 dapat berperan penting dalam mempromosikan implementasi konsep ESG dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan Indo Pasifik. Pernyataan ini juga terdapat dalam artikel yang mengatakan bahwa kawasan ASEAN dengan berbagai keunggulan yang dimiliki diharapkan dapat menjadi jangkar stabilitas global dan pusat pertumbuhan global di masa depan, termasuk ekonomi biru. Untuk itu, Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 telah mengangkat *ASEAN Blue Economy Framework* sebagai salah satu prioritas utama pada bidang ekonomi. Kerangka tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan serta mendukung inisiatif keberlanjutan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kerangka tersebut juga akan memperkuat komitmen ASEAN untuk memimpin kerja sama regional mengenai *Blue Economy* yang berfokus pada *value creation*, inklusivitas, dan keberlanjutan sebagai elemen utama. Pengembangan *ASEAN Blue Economy Framework* juga dinilai telah selaras dengan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)* yang disepakati pada tahun 2019 lalu. AOIP telah menyediakan platform di tingkat kawasan untuk memperkuat kerja sama di bidang maritim dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menavigasi posisi global ASEAN di tengah gelombang geopolitik di Indo-Pasifik (*Gali Potensi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kawasan, Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 Dorong Optimalisasi Ekonomi Biru ASEAN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, n.d.*).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan Indo Pasifik, khususnya melalui Chairmanship Indonesia di ASEAN tahun 2023, memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penerapan konsep ESG dapat mempengaruhi dan memperkuat pengembangan ekonomi biru di kawasan tersebut. Dalam aspek lingkungan (*Environmental*), implementasi konsep ESG mendorong negara-negara di kawasan Indo Pasifik untuk mengadopsi kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim. Dalam hal ini, *Chairmanship* Indonesia di ASEAN tahun 2023 memiliki peran penting dalam memperkuat kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan mempromosikan ekonomi hijau. Dalam aspek sosial (*Social*), implementasi konsep ESG melibatkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks *Chairmanship* Indonesia di ASEAN tahun 2023, hal ini dapat dicapai melalui promosi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam aspek tata kelola (*Governance*), implementasi konsep ESG melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal ini, *Chairmanship* Indonesia di ASEAN tahun 2023 dapat memainkan peran penting dalam memperkuat mekanisme tata kelola regional yang berorientasi pada ESG, termasuk peningkatan kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam hal regulasi dan kebijakan yang mendukung ekonomi biru.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi konsep ESG dalam pengembangan ekonomi biru di kawasan Indo Pasifik, melalui *Chairmanship* Indonesia di ASEAN tahun 2023, memiliki potensi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial. Upaya kolaboratif antara negara-negara di kawasan ini, dengan fokus pada perlindungan lingkungan, inklusi sosial, dan tata kelola yang baik, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi ekonomi biru yang berkelanjutan di kawasan Indo Pasifik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation | Kementerian PPN/Bappenas. (2021, November 25). <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>
- ESG: Strategi Investasi Masa Depan Berkelanjutan - Greeneration Foundation. (2022, September 15). <https://Greeneration.Org/>. <https://greeneration.org/publication/green-info/esg-strategi-investasi-masa-depan-berkelanjutan/>
- Gali Potensi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kawasan, Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 Dorong Optimalisasi Ekonomi Biru ASEAN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4981/gali-potensi-penggerak-pertumbuhan-ekonomi-baru-di-kawasan-keketuaan-asean-indonesia-2023-dorong-optimalisasi-ekonomi-biru-asean>
- Harymawan, I., Putra, F. K. G., Fianto, B. A., & Ismail, W. A. W. (2021). Financially distressed firms: Environmental, social, and governance reporting in Indonesia. *Sustainability*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810156>
- Herindrasti, S. (2019). FENOMENA INDO-PASIFIK DAN DIPLOMASI INDONESIA. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33541/japs.v3i1.965>
- Implementasi ESG Wujud Nyata Tindak Lanjut Agenda Infrastruktur G20 Presidensi Indonesia. (2022, November 12). <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Implementasi-ESG-Wujud-Nyata-Tindak-Lanjut-Agenda>
- Koroleva, E., Baggieri, M., & Nalwanga, S. (2020). Company Performance: Are Environmental, Social, and Governance Factors Important? *International Journal of Technology (IJTech)*, 11(8), 1468–1477. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v11i8.4527>
- Latupapua, C. V., Hiariy, H., Atamimi, R., Latuihamallo, J., & Latuconsina, Z. (2022). Edukasi Masyarakat Negeri Sawai; Optimalisasi Potensi Usaha di Desa Wisata Berbasis Ekonomi Biru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13–19. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4192>
- Lim, W. M., Ciasullo, M. V., Douglas, A., & ... (2022). Environmental social governance (ESG) and total quality management (TQM): A multi-study meta-systematic review. ... *Quality Management & ...* <https://doi.org/10.1080/14783363.2022.2048952>
- Mahmud, Muh. A. (2018). Gerakan Hijau di Arus Poros Maritim (Rehabilitasi Mangrove Maluku Utara Sebagai Pilar Ekonomi Biru). *Prosiding Seminar Nasional KSP2K II*, 1(2).
- Minggu, A. M., Aboladaka, J., & Nenonufa, G. F. (2023). Environmental, Social dan Governance (ESG) dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia | Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1186–1195. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1371>

- Pangestu, L. G., Hikmawan, R., & Fathun, L. M. (2021). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) Untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. (PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)), 26(1). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v26i1.2619>
- Pradana, M. A. (2021). Dampak Blue Economy Terhadap Ekosistem Di Asia Pasifik. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.2542>
- Putri, Y. N. L., & Raharyo, A. (2019). Actualizing blue economy: Multi-track diplomacy in supporting Indonesia–Philippines ocean economy cooperation (2014-2017). *AEGIS : Journal of International Relations*, 3(2), 169–188. <https://doi.org/10.33021/aegis.v3i2.710>
- Qodary, H. F., & Tambun, S. (2021). Pengaruh Environmental, Social, Governance (Esg) Dan Retention Ratio Terhadap Return Saham Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i2.266>
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 147–165. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>
- Wawancara Eksklusif Dengan Pengurus Pusat Kajian Indo Pasifik: Kita Dorong UNP Menuju Universitas Kelas Dunia. (2019, January 4). <http://indopacificstudies.unp.ac.id/>
- Jakarta, U. S. E. (2021, December 17). Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. <https://id.usembassy.gov/id/indo-pasifik-yang-bebas-dan-terbuka/>
- Russell, T. (2022, March 24). Memimpin dengan ESG: Mengapa Eksekutif dan Direksi Memerlukan Pendidikan Keberlanjutan. *Green Network Asia - Indonesia*. <https://greennetwork.id/ikhtisar/memimpin-dengan-esg-mengapa-eksekutif-dan-direksi-memerlukan-pendidikan-keberlanjutan/>
- redaksi. (2023, May 29). Blue Economy untuk Peningkatan Ekonomi dan Menjaga Kesehatan Ekosistem Laut. *Dari Laut*. <https://darilaut.id/berita/blue-economy-untuk-peningkatan-ekonomi-dan-menjaga-kesehatan-ekosistem-laut>
- Ekonomi Biru. (n.d.). KADIN Indonesia. Retrieved June 8, 2023, from <https://kadin.id/program/ekonomi-biru/>